

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan kita teliti.

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Sistem

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:1) menjelaskan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Selanjutnya menurut Mulyadi (2016:5) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Kemudian pengertian sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:3) menyatakan bahwa sistem adalah sebagai berikut:

“Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar”.

Dari pengertian yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan suatu prosedur yang saling berkaitan dan secara bersama-sama membentuk fungsi yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.1.2 Pengertian Akuntansi

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) pengertian Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya menurut Rudianto (2012:4) pengertian akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.

Dari pengertian yang telah dipaparkan dapat di simpulkan bahwa akuntansi adalah sistem informasi keuangan yang bertujuan menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.3 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2017:58) yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD”.

Selanjutnya Menurut Mahmudi (2016:19) yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat,peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah”.

Kemudian Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menerangkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi pemerintah daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang saling berhubungan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

2.1.1.4 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2017:58) mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki ciri sebagai berikut:

1. “Pencatatan
2. Pengikhtisaran
3. Pelaporan”.

Berikut penjelasan mengenai indikator tersebut adalah:

1. “Pencatatan
 - a. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
 - b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
 - c. Memindah bukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
2. Pengikhtisaran
3. Proses peringkasan transaksi-transaksi yang telah dikelompokkan sebelumnya ke dalam rekening, menjadi sebuah laporan yang berisi saldo masing-masing kelompok transaksi (Rekening).
 - a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.

- b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.
 - c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
 - d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
 - e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
 - f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
4. Pelaporan
Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi”.

2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.2.1 Pengertian Teknologi Informasi

Menurut Tata Sutabri (2014:3) Teknologi informasi adalah sebagai berikut:

“Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan”.

Selanjutnya teknologi informasi menurut Mulyadi (2014: 21) adalah sebagai berikut:

“Teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi”.

Kemudian teknologi informasi menurut Abdul Kadir dan Terra (2013: 10) adalah sebagai berikut :

“Teknologi informasi adalah studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar”.

Kemudian menurut George W. Reynolds (2010:4) mengartikan teknologi informasi sebagai berikut:

“Information technology (IT) includes all tools that capture, store, process, exchange, and use information. The field of IT includes computer hardware, such as mainframe computers, servers, laptops, and PDAs; software, such as operating systems and applications for performing various functions; networks and related equipment, such as modems, routers, and switches; and databases for storing important data”.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan teknologi yang dapat digunakan dalam aplikasi tertentu untuk memproses, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

2.1.2.2 Indikator Teknologi Informasi

Indikator teknologi informasi mengacu kepada komponen-komponen seperti yang dikemukakan oleh Sutarman (2009:14) komponen teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. *“Hardware* (perangkat keras)
2. *Software* (perangkat lunak)
3. Jaringan Komunikasi”

Berikut ini adalah penjelasan yang lebih rinci dari indikator teknologi informasi menurut Sutarman (2009:14) adalah sebagai berikut :

1. *“Hardware* (perangkat keras)
Merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. Contohnya : *monitor, keyboard, mouse, printer, harddisk, memori, microprosesor, CD-ROM*, kabel jaringan, antena telekomunikasi, *CPU*, dan peralatan I/O.
2. *Software* (perangkat lunak)
Merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus yang tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh *computer*. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :
 - a) Perangkat lunak sistem, merupakan perangkat lunak yang dibuat khusus untuk dapat mengontrol semua perangkat keras, sehingga semua perangkat keras teknologi informasi dapat bekerja dengan kompak sebagai sebuah sistem yang utuh. Misalnya : *Sistem Operasi Window, Linux, Unix, OS/2, dan FreeBSD*.
 - b) Perangkat lunak bahasa pemrograman, merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat program aplikasi maupun perangkat lunak sistem. Misalnya : *Visual Basic, Delphi, Turbo C, Fortran, Cobol, Turbo Assembler dan Java*.
 - c) Perangkat lunak aplikasi, merupakan program jadi siap pakai yang ada perangkat lunak Jet Audio, Windows Media Player, Winamp, Real Player. Untuk keperluan aplikasi perkantoran: ada *Microsoft Office* dan *Open Office* yang terdiri atas beberapa program untuk berbagai keperluan seperti pengolahan kata, angka, data dan presentasi.
3. Jaringan Komunikasi
Merupakan sebuah sistem yang terhubung yang menunjang adanya pemakaian bersama sumber di antara komputer-komputer yang berbeda”.

Berdasarkan uraian yang ada diatas, dapat dinyatakan bahwa komponen teknologi informasi terdiri dari satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2.1.2.3 Peran dan Pentingnya Teknologi Informasi

Penerapan teknologi informasi pada tiap perusahaan atau organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan teknologi informasi pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Adapun peran

dari teknologi informasi yang dikemukakan oleh Abdul Kadir (2014:15) yaitu sebagai berikut :

1. “Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses.
2. Teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses”.

Dari peranan teknologi informasi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi berperan penting dalam kehidupan manusia sebagai sumber yang dapat di percaya untuk memenuhi sebagian besar keperluan manusia.

2.1.2.4 Fungsi Teknologi Informasi

Ada beberapa fungsi teknologi informasi yang dikemukakan oleh Sutarman (2009:18) yaitu sebagai berikut:

1. “Menangkap (*Capture*)
Fungsi teknologi informasi ini mengkompilasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari *Keyboard, scanner, mic*, dan sebagainya.
2. Mengelola (*Processing*)
Fungsi teknologi informasi ini mengelola atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengelola atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubah data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.
 - a. *Data Processing*, memproses dan menolah data menjadi suatu informasi.
 - b. *Information Procesing*, suatu aktivitas computer yang memproses data dan mengolah suatu tipe/bentuk dari informasi dan mengubahnya menjadi tipe/bentuk lain dari informasi.
 - c. *Multimedia system*, suatu sistem computer yang dapat memproses berbagai tipe/bentuk dari informasi secara bersamaan (simultan).
3. Menghasilkan (*Generating*)
Fungsi teknologi infomasi ini menghasilkan atau mengorganisasikan informasi kedalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, table, grafik, dan sebagainya.

4. Menyimpan (*Storage*)
Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja disimpan ke harddisk, tape, disket, CD (*compact disc*) dan sebagainya.
5. Mencari kembali (*Retrival*)
Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya.
6. Transmisi (*Transmission*)
Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer, misalnya saja mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya”.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:31) Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kemudian menurut Kasmir (2016:7) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

2.1.3.2 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Dadang Suwanda dan Hendri Santosa (2015: 26) menjelaskan pengertian laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah”.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:21) mengemukakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

“Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya”.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi keuangan dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan oprasional pemerintah daerah.

2.1.3.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2016:11) Empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

- 1) “Relevan.
- 2) Andal.
- 3) Dapat dibandingkan.
- 4) Dapat dipahami”.

Penjelasan indikator laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

- 1) “Relevan
Relevan artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Relevansi laporan keuangan terkait dengan:

- a) Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi (*predictive value*), yaitu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang.
 - b) Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan unpan balikan dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang (*feedback value*).
 - c) Laporan keuangan disajikan tepat waktu (*timesliness*). Laporan keuangan yang baik harus disahkan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.
- 2) Andal (*Reliability*)
- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Laporan keuangan yang andal memiliki ciri berikut:
- a) Disajikan secara jujur (*faithfulness of presentation*), yaitu laporan keuangan bebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.
 - a) Dapat diverifikasi (*verifiability*), yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan.
 - b) Netral dalam penyajian (*Neutrality*), yaitu penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.
- 3) Dapat Dibandingkan (*comparability*)
- Laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis.
- 4) Dapat Dipahami (*understandability*)
- Laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan”.

2.1.3.4 Tujuan Umum dan Khusus Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas laporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Lebih rinci Bambang Supriadi dkk (2017: 42) memaparkan tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) “Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan suatu alokasi sumber daya.
- 2) Mempunyai peranan prediktif dan profeksif menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan serta resiko ketidakpastian yang terkait.
- 3) Menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran”.

Selanjutnya tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan hal berikut:

- 1) “Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomis.
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan menandai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah membiayai penyelenggaraan pemerintah.
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya”.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk menghasilkan kualitas informasi akan sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang dimiliki. Mahmudi (2016:27) mengungkapkan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas”

Kemudian Mahmudi (2016:15) menambahkan:

“Sama halnya dengan informasi akuntansi yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah, kualitas informasi tersebut akan sangat dipengaruhi seberapa bagus sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah serta standar akuntansi pemerintah yang mengaturnya.

Adapun menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2017:76) berpendapat bahwa:

“SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemda. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemda di Indonesia. Untuk dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP maka diperlukan adanya sistem akuntansi yang harus dilaksanakan oleh setiap pemda”

Hasil penelitian yang dilakukan Lia Hanifa, dkk (2016) terhadap Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan A Dahri Adi Patra, dkk (2015) terhadap karyawan bagian akuntansi di Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu juga menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan

pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian Syarifuddin Barus, dkk (2018) terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah di SKPD kota Binjai dengan judul *“Analysis Of The Effect Of Competence Of Human Resources, Application Of Government Accounting Standards, Regional Accounting Systems And Utilization Of Information Technology On The Quality Of City Government Financial Statements Binjai With Control Systems Internal Government As Moderating Variables”* menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula.

2.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan haruslah relevan, dapat dipahami, andal dan dapat dibandingkan. Hal ini sesuai dengan pengukuran kualitas laporan keuangan. Untuk memenuhi pengukuran tersebut dibutuhkan sumber daya yang memadai, salah satunya adalah teknologi informasi.

Menurut Azhar Susanto (2013:18) keterkaitan antara teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan adalah :

“Pengaruh teknologi informasi bagi perusahaan sangatlah penting. Teknologi informasi berperan penting untuk meningkatkan kualitas informasi dan juga sebagai alat bantu maupun strategi yang tangguh untuk mengintegrasikan dan mengolah data keuangan supaya lebih cepat dan akurat serta untuk penciptaan produk layanan baru sebagai daya saing untuk menghadapi kompetisi”.

Menurut Dwi Martani, dkk (2012:52) keterkaitan antara teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan adalah :

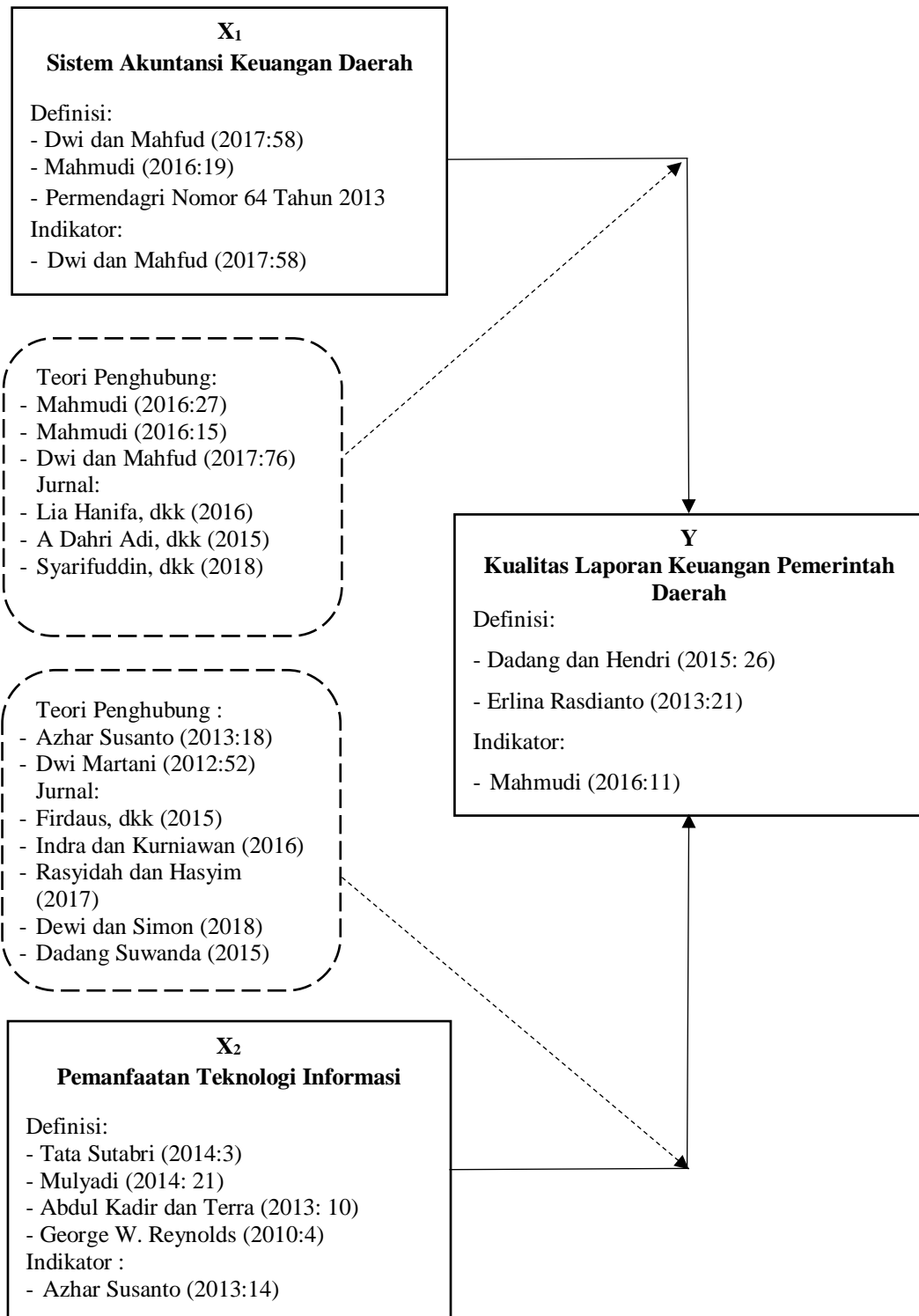
“Perkembangan teknologi komputer dan informasi menyebabkan proses akuntansi dapat dilakukan dengan cepat. Informasi detail transaksi dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan pemakai. Teknologi informasi juga memungkinkan proses kompilasi laporan keuangan dan unit organisasi yang terpisah dapat dilakukan secara cepat. Kondisi ini dapat mempercepat waktu yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga pengguna dapat menerima informasi lebih cepat.”

Adapun ungkapan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, dkk (2015) terhadap 38 SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh diwakili 2 orang yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi oleh PPK dan Pembantu PPK maka akan mempercepat proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemko Banda Aceh, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dapat lebih akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ungkapan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Indra Suyoto dan Kurniawan (2016) dan Rasyidah Nadir dan Hasyim (2017) yang mengatakan bahwa

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Simon Pulung Nugroho (2018) tentang “*The Impact of Information Tehcnology on Financial Statement Quality A Moderating Role of Internal Control System*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Selanjutnya Dadang Suwanda (2015) “*Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)*” menunjukkan hal yang sama bahwa “*Utilization of Information Technology significantly affect the quality of local government financial reports*” yang artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari hasil penelitian yang telah di paparkan dapat kita simpulkan bahwa teknologi informasi merupakan sebagai alat bantu dalam mengolah data keuangan supaya lebih cepat dan akurat agar menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi penggunanya.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2014:99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Kemudian hipotesis menurut Umi Narimawati (2010:7) adalah asumsi atau dugaan dengan sementara yang harus diuji kebenarannya dalam suatu analisis statistik.

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya.

Bedasarkan kerangka pemikiran yang telah digambarkan, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H₁ : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah

H₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.